

Catatan Editor:

Pasar Kerja Indonesia dan Tugas Negara untuk Memanusiakan Pertumbuhan

Oleh: Muhyiddin Martain
Perencana Pembangunan Nasional di Bappenas

Ekonomi global sedang berhadapan dengan paradoks baru. Pertumbuhan terus terjadi, tetapi pekerjaan tak lagi bertambah seiring laju itu. Mesin produksi makin cerdas, kecerdasan buatan menggantikan banyak tugas manusia, dan teknologi mengubah wajah industri lebih cepat dari yang bisa diantisipasi kebijakan publik. Fenomena ini disebut *jobless growth*, pertumbuhan tanpa pertumbuhan pekerjaan.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, persoalan ini terasa nyata. Ekonomi tumbuh stabil di kisaran lima persen, namun sebagian besar tenaga kerja masih berada di sektor informal. Pekerjaan formal hanya tumbuh tipis, sementara generasi muda menghadapi pasar kerja yang sempit dan tidak pasti. Kita menyaksikan apa yang disebut Bank Dunia sebagai “ketidaksinkronan antara pertumbuhan dan kesejahteraan” (World Bank, 2023).

Di tengah perubahan global itu, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana menciptakan pasar kerja yang benar-benar bekerja, tidak hanya bagi dunia usaha, tetapi juga bagi manusia yang menopang pertumbuhan itu. Pertanyaan ini menjadi inti *11th Annual Richard Goode Lecture* yang diselenggarakan IMF di Washington, November 2025.

Pembicaranya, Alexandra Roulet, ekonom yang sedang moncer dari Prancis, menyajikan materi kuliah umum berjudul *“Making Labor Markets Work for Workers and Businesses.”* Judul yang sederhana, tetapi mengandung makna besar: bagaimana menyeimbangkan kepentingan bisnis dan pekerja di tengah transformasi global yang semakin kompleks (IMF, 2025).

Alexandra Roulet dan Gagasan Keseimbangan Baru

Roulet adalah salah satu ekonom muda paling bersinar di Eropa. Ia menempuh pendidikan di École Normale Supérieure dan meraih gelar doktor ekonomi dari Harvard University. Kini ia menjadi Associate Professor di INSEAD, salah satu sekolah bisnis terkemuka di dunia. Ia juga

pernah menjadi penasihat ekonomi Presiden Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Élisabeth Borne (INSEAD, 2024).

Risetnya berfokus pada kebijakan pasar kerja, asuransi pengangguran, dan dampak teknologi terhadap ketimpangan sosial (Roulet, 2023). Pada 2024, ia dinobatkan sebagai “Best Young Economist of France” oleh *Le Monde* dan *Le Cercle des Économistes*. Gaya berpikir Roulet khas generasi ekonom baru: empiris, sensitif terhadap keadilan sosial, tetapi juga realistis terhadap kebutuhan bisnis.

Dalam kuliahnya di IMF, Roulet berbicara dengan tenang namun menusuk. Ia tidak sekadar memaparkan teori, melainkan menggugat asumsi lama dalam kebijakan ketenagakerjaan. “Pasar kerja yang bekerja untuk semua bukanlah kemewahan,” katanya, “tetapi fondasi dari ekonomi yang tangguh” (Roulet, 2025).

Pesan pertama adalah keseimbangan antara fleksibilitas dan perlindungan. Roulet menilai banyak negara gagal menjaga keseimbangan ini. Ketika kebijakan terlalu kaku, perusahaan kehilangan daya saing dan enggan merekrut. Sebaliknya, ketika pasar terlalu bebas, pekerja kehilangan rasa aman dan produktivitas jangka panjang menurun. Negara-negara seperti Denmark, Belanda, dan Finlandia menemukan jalan tengah dengan menerapkan konsep *flexicurity*, yakni fleksibilitas pasar kerja yang dipadukan dengan jaminan sosial yang kuat (OECD, 2024).

Perusahaan di negara-negara itu bebas menyesuaikan struktur kerja, tetapi negara menjamin pekerja mendapat pelatihan ulang dan asuransi transisi. Dengan begitu, perubahan ekonomi tidak berarti kehilangan penghidupan. Roulet menyebut model ini sebagai *productive security*—keamanan yang mendorong produktivitas, bukan yang meninabobokan.

Pesan kedua adalah gelombang teknologi dan kecerdasan buatan akan menjadi pembeda masa depan. Jika revolusi industri menggantikan otot manusia, maka revolusi digital menggantikan sebagian kemampuan berpikirnya. Pekerjaan rutin akan hilang, sementara pekerjaan yang menuntut empati, kreativitas, dan penalaran justru meningkat (ILO, 2024). Tantangannya bukan pada hilangnya pekerjaan, tetapi pada kemampuan berpindah dari satu jenis pekerjaan ke jenis lain.

Pesan ketiga adalah negara harus aktif menyiapkan transisi itu. Roulet menegaskan pentingnya *Active Labor Market Policies* (ALMPs)—kebijakan pasar kerja aktif seperti pelatihan ulang, insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan *upskilling*, bantuan penempatan kerja, dan asuransi kehilangan pekerjaan. “Negara tidak perlu menahan arus

perubahan,” kata Roulet, “yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rakyatnya agar mampu berenang di arus itu.”

Pelajaran bagi Negara Berkembang dan Indonesia

Pesan Roulet menjadi cermin besar bagi negara berkembang. Banyak ekonomi tumbuh pesat dalam dua dekade terakhir, namun penyerapan tenaga kerja stagnan. Laporan OECD dan Bank Dunia mencatat gejala *jobless growth* melanda Asia dan Amerika Latin (OECD, 2024; World Bank, 2023). Industri semakin otomatis, tetapi angkatan kerja tidak cukup terampil untuk mengisi pekerjaan baru yang muncul.

Negara berkembang juga menghadapi masalah struktural lain, yaitu lemahnya kelembagaan pasar kerja. Pelatihan sering berbasis proyek, bukan sistem. Data tenaga kerja tersebar di banyak lembaga. Koordinasi kebijakan antara kementerian ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan tidak sinkron. Akibatnya, kebijakan bagus di atas kertas gagal di lapangan (ILO, 2022).

Roulet mengingatkan bahwa tidak ada model tunggal. Setiap negara harus menemukan keseimbangannya sendiri. Yang penting bukan meniru negara maju, tetapi membangun desain kebijakan yang sesuai dengan struktur ekonomi dan kapasitas kelembagaan lokal. Negara berkembang, menurutnya, tidak boleh terjebak pada kebijakan pasif. Perlindungan sosial harus dipadukan dengan kebijakan transisi agar pekerja tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh.

Bagi Indonesia, pesan Roulet terasa relevan dan mendesak. Ekonomi kita sedang bertransformasi dari padat karya ke padat teknologi. Hilirisasi industri sumber daya alam menciptakan lapangan kerja baru, tetapi membutuhkan keterampilan menengah yang belum banyak tersedia. Ekonomi digital berkembang cepat, namun tidak semua pekerja mampu beradaptasi dengan pola kerja berbasis platform.

Program Kartu Prakerja dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah langkah maju, namun belum cukup menjawab tantangan struktural. Pelatihan kerja masih lebih banyak berorientasi pada penyerapan dana, bukan kebutuhan pasar. Sementara itu, sebagian besar tenaga kerja—sekitar 60 persen—masih bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial dan tanpa akses pelatihan (BPS, 2025; Kemnaker, 2024).

Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial yang makin lengkap, tetapi belum memiliki sistem transisi kerja yang kuat. Pekerja yang kehilangan pekerjaan memang bisa menerima bantuan, namun belum mendapat

dukungan untuk berpindah ke sektor baru. Inilah perbedaan antara perlindungan dan pemberdayaan. Negara yang tangguh adalah negara yang mempersiapkan warganya untuk perubahan, bukan sekadar menolong setelah perubahan datang.

Kita juga menghadapi kesenjangan besar antara pendidikan dan dunia kerja. Lulusan universitas belum tentu siap kerja, sementara industri kekurangan tenaga terampil. Pendidikan vokasi sering kali terputus dari kebutuhan industri. Banyak Balai Latihan Kerja berdiri, tetapi tidak berfungsi optimal. Yang terjadi bukan kekurangan program, melainkan kelebihan birokrasi.

Roulet mengingatkan bahwa pasar kerja tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian. Ia adalah hasil koordinasi antara kebijakan industri, fiskal, pendidikan, dan sosial. Indonesia membutuhkan “ekosistem ketenagakerjaan” yang terintegrasi, bukan proyek sektoral yang berdiri sendiri.

Dari seluruh pandangan Roulet, ada dua agenda kebijakan yang paling mendesak bagi Indonesia.

Agenda pertama adalah membangun sistem insentif yang mendorong transisi pekerja. Saat ini, kebijakan kita masih berfokus pada perlindungan setelah kehilangan pekerjaan. Padahal, yang lebih penting adalah mencegah pekerja jatuh. Pemerintah dapat memberi potongan pajak atau subsidi pelatihan bagi perusahaan yang melakukan *reskilling* sebelum melakukan restrukturisasi. Skema seperti ini sudah terbukti berhasil di Korea Selatan melalui *Employment Insurance Rebate* (OECD, 2024). Jika diadaptasi dengan baik, program JKP bisa berkembang dari jaring pengaman menjadi jaminan mobilitas kerja.

Agenda kedua adalah membangun sistem pembelajaran ulang nasional yang berkelanjutan. Dunia kerja berubah cepat, dan pelatihan tidak bisa lagi bersifat sementara. Indonesia memerlukan sistem *life-long learning* yang terhubung dengan industri. Setiap pekerja perlu memiliki akun pelatihan pribadi seperti model *SkillsFuture* di Singapura (World Bank, 2022). Pemerintah menjadi fasilitator, sementara dunia usaha menjadi penentu kebutuhan keterampilan.

Kedua agenda ini bukan hanya teknis, melainkan politik. Mereka menuntut keberanian untuk mengubah cara pandang. Pasar kerja bukan sekadar urusan ketenagakerjaan, melainkan fondasi kesejahteraan dan produktivitas nasional.

Menemukan Kembali Kontrak Sosial Ketenagakerjaan

Di balik seluruh analisis Roulet tersembunyi pesan moral yang kuat. Pasar kerja adalah cermin kontrak sosial sebuah bangsa. Apakah negara melihat pekerja sebagai biaya yang harus ditekan, atau sebagai aset yang harus dikembangkan.

Menata ulang kontrak sosial ketenagakerjaan berarti menegaskan kembali tanggung jawab bersama. Pemerintah menjamin transisi yang aman. Perusahaan berinvestasi dalam keterampilan manusia. Pekerja berkomitmen untuk terus belajar. Dalam keseimbangan ini, fleksibilitas dan keadilan tidak lagi bertentangan, tetapi saling menguatkan.

Jan Tinbergen, perintis ilmu perencanaan pembangunan, pernah menulis bahwa kebijakan ekonomi yang baik adalah seni menyeimbangkan efisiensi dan keadilan (Tinbergen, 1967). Seni itu kini paling diuji di pasar kerja. Karena di sinilah masa depan produktivitas, stabilitas sosial, dan kohesi bangsa dipertaruhkan.

Roulet menutup kuliahnya dengan kalimat yang seolah ditujukan kepada kita semua. *“A labor market that works for everyone is not a luxury, it is the foundation of a resilient economy.”* (Roulet, 2025).

Kalimat itu mungkin sederhana, tetapi mengandung peringatan sekaligus harapan. Indonesia tidak kekurangan rencana ekonomi, namun sering lupa bahwa manusia adalah mesin utama pembangunan. Pertumbuhan baru akan berarti bila manusia yang bekerja di dalamnya ikut tumbuh.

Pasar kerja yang sehat bukan sekadar mesin ekonomi. Ia adalah wujud keberpihakan pada manusia. Di balik setiap angka pertumbuhan, yang sesungguhnya diuji adalah satu hal: apakah pembangunan masih berpihak pada mereka yang bekerja.